

SOLIDARITAS SIPIL DALAM PERANG MODERN: STUDI KASUS PERLAWANAN MASYARAKAT SIPIL UKRAINA DALAM PERANG MELAWAN RUSIA TAHUN 2023-2024

Valetta Sophie Jacob¹, Indra Wisnu Wibisono², Roberto Octavianus Cornelius Seba³

^{1,2,3}Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia

Email: 372021030@student.uksw.edu

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran solidaritas sipil dalam membangun perlawanan masyarakat Ukraina terhadap agresi Rusia pada periode 2023-2024 dalam konteks perang modern. Transformasi karakter perang modern yang ditandai dengan taktik hibrida, keterlibatan aktor nonnegara, serta perang informasi menjadikan masyarakat sipil bukan lagi pihak pasif, tetapi aktor strategis dalam arsitektur ketahanan negara. Dengan menggunakan kerangka konstruktivisme, *soft power*, masyarakat sipil transnasional, dan ketahanan nasional, penelitian ini menjelaskan bagaimana identitas nasional, nilai bersama, serta narasi kolektif membentuk kapasitas mobilisasi rakyat Ukraina selama konflik berlangsung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa solidaritas sipil terbentuk melalui proses historis yang panjang, mulai dari penguatan identitas pasca-kemerdekaan, mobilisasi politik pada Revolusi Oranye dan Euromaidan, hingga konsolidasi jaringan sosial setelah invasi 2022. Pada masa eskalasi perang, solidaritas ini termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti mobilisasi relawan, dukungan logistik pertahanan, kampanye digital, aktivisme diaspora, serta diplomasi publik akar rumput yang memperkuat dukungan internasional. Seluruh dinamika tersebut memperlihatkan bahwa perlawanan Ukraina tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga ditopang oleh kohesi sosial dan inisiatif sipil yang berfungsi sebagai fondasi ketahanan nasional nonmiliter. Penelitian ini menyimpulkan bahwa solidaritas sipil berperan sebagai mekanisme kunci yang memungkinkan masyarakat Ukraina mempertahankan kedaulatan negara di tengah karakter perang modern yang kompleks dan multidimensional.

Kata Kunci: Solidaritas Sipil, Perang Modern, Ukraina, Soft Power, Konstruktivisme, Ketahanan Nasional.

Abstract

This study examines the role of civil solidarity in shaping the Ukrainian society's resistance to Russian aggression during the 2023-2024 phase of the ongoing conflict, situated within the broader framework of modern warfare. The transformation of contemporary conflict characterized by hybrid tactics, asymmetric strategies, information warfare, and the involvement of non state actors positions civilians not merely as passive victims but as strategic agents within national resilience. Using constructivism, soft power, transnational civil society, and national resilience as analytical frameworks, this research explores how shared identities, collective narratives, and socially constructed meanings mobilize civic participation in times of existential threat. The findings indicate that Ukrainian civil solidarity emerged from a long historical trajectory, including post independence nation building, the Orange Revolution, Euromaidan, and the intensification of social networks after the 2022 invasion. During the escalation of war, this solidarity manifested through volunteer mobilization, logistical support for defense, digital campaigns, diaspora activism, and grassroots public diplomacy, all of which strengthened domestic cohesion and international support. The study concludes that Ukraine's resistance is sustained not only by military capabilities but also by a deep reservoir

of civic initiative and social cohesion that function as essential pillars of non military national resilience in the context of modern warfare.

Keywords: *Civil Solidarity, Modern Warfare, Ukraine, Soft Power, Constructivism, National Resilience.*

A. PENDAHULUAN

Perang merupakan salah satu bentuk konflik tertua dalam sejarah umat manusia (Howard, 2001). Seiring perkembangan teknologi dan dinamika geopolitik global, karakteristik perang mengalami transformasi yang signifikan (Kaldor, 2012). Transformasi ini melahirkan bentuk baru dari konflik bersenjata yang dikenal sebagai perang modern, yang melibatkan dimensi yang lebih luas dari sekadar pertempuran fisik, termasuk penggunaan teknologi canggih, taktik asimetris, serta strategi siber, informasi, dan ekonomi. Secara konseptual, Sloan (2012) mendefinisikan perang modern sebagai konflik yang mengintegrasikan kemampuan militer, politik, ekonomi, dan informasi ke dalam suatu strategi yang kompleks, yang sering kali berlangsung di luar batas-batas medan perang tradisional. Dengan demikian, perang modern tidak hanya berbeda dari segi bentuk dan pelaku yang terlibat, tetapi juga memiliki karakteristik khusus yang mencerminkan dinamika konflik di era kontemporer.

Salah satu karakteristik utama dari perang modern adalah sifatnya yang asimetris, di mana kekuatan militer yang tidak seimbang saling berhadapan. Dalam hal ini, pihak yang lebih lemah secara konvensional sering menggunakan taktik gerilya, sabotase, atau teror untuk mengimbangi keunggulan lawan, sebagaimana terlihat dalam konflik antara kelompok bersenjata dan negara (Mack, 1975). Perang modern memiliki sifat hibrida, yaitu menggabungkan berbagai bentuk operasi militer, siber, diplomatik, ekonomi, dan informasi secara simultan dan terkoordinasi (Hoffman, 2007). Strategi ini membuat batas antara perang dan damai menjadi kabur. Karakteristik lain yang mencolok adalah keterlibatan aktor non-negara seperti kelompok teroris, milisi, atau perusahaan militer swasta yang memainkan peran signifikan dalam lanskap konflik kontemporer (Kaldor, 2012). Keberadaan pihak-pihak tersebut menambah kompleksitas perang modern karena mereka sering kali beroperasi di luar kerangka hukum internasional dan sulit diidentifikasi sebagai bagian dari aktor formal dalam konflik bersenjata.

Selain perubahan dalam taktik dan aktor yang terlibat, perang modern juga memengaruhi pergeseran peran masyarakat sipil dalam konflik. Dalam perang konvensional, masyarakat cenderung diposisikan sebagai korban pasif, maka dalam konteks perang modern, peran tersebut mengalami transformasi menjadi lebih aktif dan kompleks. Masyarakat tidak hanya menjadi target dalam operasi militer atau disinformasi, tetapi juga terlibat langsung sebagai bagian dari strategi perang, baik secara sukarela maupun tidak disengaja (Kaldor, 2012). Dalam perang modern berbasis informasi, misalnya, individu sipil dapat menjadi agen penyebaran propaganda atau hoaks yang dikendalikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama melalui media sosial dan platform digital lainnya (Rid, 2020). Keterlibatan masyarakat sipil juga tampak dalam bentuk partisipasi dalam milisi bersenjata, kelompok sukarelawan, atau jaringan siber yang mendukung operasi militer dan nonmiliter, sebagaimana tercermin dalam berbagai konflik kontemporer seperti di Ukraina dan Suriah (Rauta, 2021). Pergeseran ini menunjukkan semakin kaburnya batas antara kombatan dan nonkombatan dalam perang modern, serta perlunya peninjauan ulang terhadap kerangka hukum dan etika dalam menilai peran masyarakat dalam konflik bersenjata.

Dalam kajian mengenai perang modern, konflik antara Rusia dan Ukraina menempati posisi penting sebagai contoh aktual bagaimana dinamika kekuasaan, teknologi, dan identitas berinteraksi dalam bentuk-bentuk perang kontemporer. Ukraina, sebagai salah satu republik terbesar dalam Uni Soviet, secara resmi menyatakan kemerdekaannya melalui referendum yang

memperoleh dukungan lebih dari 90% rakyatnya. Kemerdekaan tersebut membuka babak baru dalam hubungan bilateral dengan Rusia, yang pada saat itu sedang menghadapi krisis internal dan kehilangan pengaruh atas wilayah yang secara historis dianggap sebagai bagian dari lingkup strategis dan kulturalnya (Plokhy, 2015). Bagi Rusia, Ukraina bukan hanya tetangga geografis, tetapi juga representasi warisan peradaban Slavia Timur yang menjadi elemen penting dalam narasi nasionalisme Rusia (Mankoff, 2022).

Di sisi lain, Ukraina menghadapi tantangan besar dalam membangun institusi demokrasi, menata ulang sistem ekonomi, serta memperkuat identitas nasional yang selama beberapa dekade sebelumnya ditekan oleh dominasi Rusia. Persoalan terkait bahasa, narasi sejarah, dan orientasi politik menjadi sumber perdebatan domestik yang tajam, terutama antara wilayah barat yang cenderung pro-Barat dan wilayah timur yang memiliki kedekatan historis dan kultural dengan Rusia (Hale, 2014). Sementara itu, Rusia berupaya mempertahankan pengaruhnya atas Ukraina melalui berbagai saluran nonmiliter, seperti tekanan ekonomi, dukungan terhadap elite politik pro-Rusia, serta kontrol terhadap pasokan energi (Menon & Rumer, 2015). Di tengah dinamika ini, konsolidasi kekuasaan oleh elite politik Ukraina dan stagnasi proses demokratisasi memicu kekecewaan yang meluas, terutama di kalangan masyarakat sipil dan generasi muda. Situasi tersebut secara bertahap mendorong tumbuhnya kesadaran politik warga negara, yang kemudian berkembang menjadi kekuatan kolektif dalam menuntut perubahan melalui aksi-aksi sosial yang semakin terorganisasi (Onuch, 2014).

Invasi militer Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 menjadi ilustrasi nyata bagaimana agresi eksternal dapat mempercepat transformasi solidaritas sipil. Serangan yang menargetkan infrastruktur vital, menghancurkan kota-kota besar, dan mengganggu stabilitas ekonomi serta keamanan warga sipil, tidak hanya menciptakan penderitaan luas, tetapi juga memunculkan respons kolektif yang terorganisasi. Warga dari berbagai latar belakang sosial berinisiatif membangun jaringan bantuan kemanusiaan, menggalang dana internasional, serta menyebarkan informasi untuk melawan propaganda musuh. Bahkan dalam kondisi penuh keterbatasan, solidaritas sipil menjelma menjadi bentuk perlawanan nonmiliter yang efektif, memperlihatkan kapasitas masyarakat untuk mengisi ruang kosong yang tidak sepenuhnya mampu ditangani oleh institusi formal negara.

Perang ini menjadi momen reflektif bagi rakyat Ukraina dalam mendefinisikan kembali makna kebangsaan. Nasionalisme tidak lagi bersifat simbolik, melainkan berubah menjadi bentuk komitmen nyata dalam menjaga kedaulatan dan martabat bangsa. Solidaritas yang tumbuh di tengah ancaman memperlihatkan bagaimana keterlibatan sipil menjadi elemen krusial dalam perjuangan mempertahankan negara. Melihat signifikansi peran masyarakat sipil dalam dinamika konflik bersenjata ini, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana solidaritas sipil terbentuk, dimanifestasikan, dan dijalankan sebagai bagian integral dari strategi ketahanan nasional nonmiliter Ukraina dalam menghadapi agresi Rusia.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran solidaritas sipil dalam membangun perlawanan masyarakat Ukraina terhadap agresi Rusia dalam perang Ukraina–Rusia, mengidentifikasi berbagai bentuk solidaritas sipil yang terorganisir serta kontribusinya dalam memperkuat ketahanan sosial, logistik, dan dukungan militer selama konflik, menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terbentuknya solidaritas sipil di tingkat domestik maupun transnasional, mengevaluasi mekanisme mobilisasi yang memungkinkan masyarakat sipil berperan secara efektif dalam kondisi perang modern, serta menilai implikasi solidaritas sipil terhadap ketahanan nasional nonmiliter Ukraina dan dukungan internasional yang diterimanya sepanjang periode 2023 sampai 2024.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis mendalam pada solidaritas sipil dalam konteks perang modern (Glenn A. Bowen,

2009). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengeksplorasi realitas sosial yang kompleks, khususnya perlawanan masyarakat sipil Ukraina terhadap agresi militer Rusia. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk-bentuk solidaritas, pola mobilisasi, serta strategi perlawanan non-militer yang muncul dari kelompok masyarakat sipil. Studi ini menggunakan kerangka interpretatif untuk menggali makna tindakan sosial yang dilakukan oleh aktor-aktor sipil dalam situasi konflik (Schutz, Alfred, 1967). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengamati aspek faktual, tetapi juga menggali konstruksi sosial dan simbolik dari tindakan solidaritas yang dilakukan. Pendekatan ini dianggap paling relevan dalam menggambarkan dinamika perlawanan dalam konteks perang yang bersifat multidimensional.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama: studi pustaka dan analisis media. Studi pustaka mencakup literatur akademik, laporan dari lembaga internasional, serta dokumentasi dari organisasi non-pemerintah yang aktif di wilayah konflik. Sementara itu, analisis media dilakukan untuk memahami bagaimana narasi solidaritas dibentuk, disebarluaskan, dan diterima oleh publik, baik di dalam maupun luar Ukraina. Data yang diperoleh dari ketiga sumber ini diolah dan dianalisis secara tematik guna mengidentifikasi pola-pola solidaritas dan strategi perlawanan yang dominan (Bowen, 2009).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode literatur review (studi literatur), dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif-analitis. Data dianalisis melalui proses telaah sistematis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, buku, serta publikasi resmi dari organisasi kemanusiaan dan hak asasi manusia (Bowen, 2009). Setiap dokumen dianalisis berdasarkan relevansinya terhadap tema solidaritas sipil dan perlawanan non-militer dalam konteks perang Rusia–Ukraina.

Peneliti mengkategorikan data berdasarkan tema utama yang berkaitan dengan bentuk solidaritas, pola mobilisasi masyarakat, dan strategi perlawanan sipil. Validitas hasil analisis dijaga dengan melakukan seleksi kritis terhadap literatur yang digunakan, memastikan bahwa sumber tersebut berasal dari institusi kredibel dan terverifikasi. Hasil analisis disusun dalam bentuk narasi konseptual yang menggambarkan dinamika solidaritas sipil secara komprehensif dalam konteks perang modern. Dalam menjaga objektivitas, peneliti secara reflektif mencatat potensi bias dan posisi subyektif selama proses penelitian berlangsung. Data akhir disajikan dalam bentuk narasi analitis yang mendalam dan didukung oleh kutipan data primer maupun sekunder yang relevan. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal akses langsung ke wilayah konflik dan kemungkinan keterbatasan keterbukaan informan karena sensitivitas isu. Oleh karena itu, peneliti mengandalkan data sekunder yang dapat diverifikasi serta melakukan wawancara dengan narasumber yang dapat dipercaya dan memiliki kredibilitas. Selain itu, penelitian ini juga menghadapi tantangan dalam membedakan informasi faktual dengan opini atau propaganda yang beredar di media. Untuk mengantisipasi hal tersebut, peneliti menggunakan metode validasi silang antar sumber dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam interpretasi data. Etika penelitian dijaga melalui informed consent, kerahasiaan identitas narasumber, dan penghormatan terhadap kerentanan situasi yang dihadapi oleh partisipan. Dengan pendekatan yang hati-hati dan reflektif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam kajian solidaritas sipil dan perlawanan dalam konflik kontemporer.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang saling melengkapi untuk menelusuri narasi solidaritas sipil selama masa perang. Sumber primer disokong dari dokumen resmi seperti laporan tahunan, siaran pers, dan pernyataan langsung organisasi masyarakat sipil Ukraina, lembaga kemanusiaan internasional, serta institusi pemerintahan yang berkaitan dengan konflik Rusia dan Ukraina. Selain itu, data primer mencakup transkrip wawancara, pidato tokoh sipil, dan kesaksian yang dipublikasikan melalui platform resmi maupun forum daring. Seluruh bahan ini menjadi pijakan utama untuk memahami bagaimana solidaritas sipil dirumuskan, dikomunikasikan, dan dijalankan di tingkat praktik.

Sumber sekunder berasal dari literatur akademik yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, artikel opini ahli, dan hasil penelitian terdahulu mengenai solidaritas dan perlawanan sipil. Data sekunder juga mencakup laporan media independen, analisis kebijakan dari lembaga riset internasional, dan dokumentasi historis tentang dinamika konflik di Ukraina. Penggunaan sumber sekunder dimaksudkan untuk memperkaya konteks analisis, membandingkan berbagai sudut pandang, serta memberi landasan teoritis yang kokoh dalam membingkai temuan. Dengan menggabungkan kedua jenis sumber ini, penelitian diharapkan menyajikan gambaran yang komprehensif tentang solidaritas sipil dalam perang modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan penelaahan sistematis terhadap dokumen dan literatur yang berkaitan dengan perlawanan masyarakat sipil Ukraina dalam konflik Rusia dan Ukraina. Analisis dimulai dengan mengidentifikasi tema utama dari keseluruhan korpus, seperti bentuk solidaritas, strategi perlawanan nonmiliter, dan keterlibatan aktor sipil. Setiap informasi kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori yang relevan dengan fokus penelitian, dilanjutkan dengan perbandingan temuan antarsumber untuk menemukan pola umum dan kontradiksi yang memperkaya interpretasi. Hasil analisis disusun secara naratif agar mampu menjelaskan dinamika solidaritas sipil secara mendalam dan kontekstual dalam kerangka perang modern.

Untuk menjaga kualitas dan ketepatan data, peneliti menerapkan validasi melalui telaah kritis atas keandalan dan kredibilitas sumber. Hanya literatur dari lembaga terpercaya, jurnal akademik terindeks, dan laporan resmi yang digunakan sebagai rujukan utama. Proses triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai jenis sumber, baik primer maupun sekunder, untuk memastikan konsistensi informasi. Sepanjang proses, peneliti mencatat posisi subjektif dan potensi bias secara reflektif agar keputusan analitik bisa ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Keterbatasan akses langsung ke lapangan diatasi dengan memperluas cakupan literatur dari beragam perspektif nasional dan internasional serta menerapkan kehati-hatian dalam menafsirkan temuan. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menghadirkan analisis yang akurat, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Historis dan Politik Ukraina: Fondasi Lahirnya Solidaritas Sipil

Kemerdekaan Ukraina pada tahun 1991 merupakan peristiwa historis yang menandai transformasi mendalam dalam struktur politik, sosial, dan identitas nasional negara tersebut. Peristiwa ini tidak hanya berfungsi sebagai titik awal pembentukan negara modern Ukraina, tetapi juga sebagai fondasi penting bagi perkembangan solidaritas sipil yang semakin menguat dalam dekade berikutnya. Latar belakang keluarnya Ukraina dari Uni Soviet tidak dapat dipisahkan dari dinamika reformasi internal yang diluncurkan oleh Mikhail Gorbachev pada akhir 1980-an melalui kebijakan glasnost dan perestroika yang membuka ruang bagi republik-republik Soviet untuk mengekspresikan identitas nasional yang selama ini ditekan sekaligus memperbesar ruang kritik terhadap otoritas pusat di Moskow (Sunny, 2022). Di Ukraina, kondisi ini memicu kebangkitan organisasi politik dan gerakan sosial seperti Rukh atau People's Movement of Ukraine yang secara aktif mendorong agenda kedaulatan nasional (Wilson, 2002).

Seiring dengan penguatan gerakan politik, terjadi revitalisasi sejarah kolektif yang selama beberapa dekade disisihkan, termasuk peringatan atas tragedi Holodomor dan represi era Stalin yang kembali diposisikan sebagai memori bersama pembentuk kesadaran kebangsaan (Snyder, 2010). Kesadaran historis tersebut memperkuat tuntutan publik terhadap otonomi dan kendali nasional atas kebijakan domestik. Momentum kemudian berpuncak pada Deklarasi Kemerdekaan Ukraina pada 24 Agustus 1991 yang memperoleh legitimasi luas melalui referendum nasional pada 1 Desember 1991 ketika lebih dari 90 persen peserta referendum memilih mendukung kemerdekaan (Plokhyy, 2015). Dukungan signifikan dari berbagai wilayah, termasuk yang berbahasa Rusia, menunjukkan bahwa aspirasi kemerdekaan bukan semata

agenda elite nasionalis, melainkan konsensus publik yang luas. Dengan demikian, kemerdekaan Ukraina merupakan hasil struktural dari krisis legitimasi politik dan ekonomi Uni Soviet, bukan akibat konflik bersenjata atau perpecahan etnis. Karakter kemerdekaan yang relatif damai ini memiliki implikasi penting bagi perkembangan masyarakat sipil Ukraina yang sejak awal lebih mengandalkan mobilisasi sosial dan jaringan horizontal dibandingkan struktur militer atau partai politik terpusat.

Periode pascakemerdekaan kemudian menampilkan tonggak partisipasi warga yang menguatkan tradisi aktivisme sipil. Revolusi Oranye pada 2004 menjadi titik balik signifikan. Pemicu utamanya adalah pemilihan presiden November 2004 antara Viktor Yushchenko dan Viktor Yanukovych yang diwarnai tuduhan kecurangan masif, mulai dari manipulasi suara, intimidasi pemilih, hingga ketidaktransparanan penghitungan. Pengamat internasional dan organisasi pemantau pemilu domestik melaporkan pelanggaran sistematis yang menguntungkan Yanukovych sehingga kepercayaan publik terhadap integritas pemilu terkikis (Karatnycky, 2005). Ketidakpuasan ini berkembang menjadi mobilisasi massa damai berskala besar di Kyiv dan berbagai kota lain, berpusat di Maidan Nezalezhnosti, menuntut pemilu ulang dan pemulihan demokrasi dari praktik oligarkis serta campur tangan eksternal (D'Anieri, 2006). Mahkamah Agung Ukraina kemudian memerintahkan pemungutan suara ulang yang menghasilkan kemenangan bagi Viktor Yushchenko pada Desember 2004, menandai kemenangan gerakan prodemokrasi dan akuntabilitas publik. Momentum tersebut memperkuat gagasan bahwa masyarakat sipil Ukraina memiliki kapasitas mobilisasi tinggi dan kemauan mempertahankan nilai-nilai demokratis sebagai dasar legitimasi politik (McFaul, 2007). Dalam jangka panjang, Revolusi Oranye memperjelas polarisasi internal terkait orientasi geopolitik, menunjukkan bahwa legitimasi politik tidak lagi dapat ditopang oleh patronase elit semata melainkan harus responsif terhadap kehendak publik, serta menjadi preseden bagi mobilisasi sipil berikutnya termasuk Euromaidan pada 2013 hingga 2014 (Way, 2015).

Euromaidan yang berlangsung dari November 2013 hingga Februari 2014 merupakan momen konsolidasi solidaritas sipil paling krusial sejak kemerdekaan. Peristiwa ini berawal dari keputusan Presiden Viktor Yanukovych untuk menanggukuhkan penandatanganan Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa. Penundaan tersebut dipersepsikan publik sebagai pengkhianatan terhadap aspirasi demokratis pasca Revolusi Oranye sekaligus simbol kembalinya praktik politik oligarkis yang mengabaikan kehendak rakyat, sehingga gelombang protes berkembang melampaui isu orientasi geopolitik semata (Kuzio, 2015). Proses mobilisasi menunjukkan karakter solidaritas sosial yang kuat dan meluas. Mahasiswa, kelas menengah kota, komunitas religius, organisasi hak asasi manusia, kelompok profesional, hingga diaspora Ukraina terlibat aktif dalam mengorganisasi protes, menyediakan logistik, dan membangun struktur koordinasi informal yang menopang keberlanjutan aksi dalam jangka panjang, memperlihatkan transformasi masyarakat sipil dari struktur yang terfragmentasi menjadi jaringan yang lebih kohesif dan berorientasi pada tujuan kolektif (Onuch, 2014). Salah satu elemen pengikatnya adalah penguatan identitas kewargaan yang menekankan nilai kebebasan, kesetaraan politik, dan hak menentukan arah masa depan negara, yang melampaui batas etnis, bahasa, dan wilayah. Fenomena ini dipahami sebagai civic identity resurgence yang membedakan Euromaidan dari mobilisasi yang bersifat regional atau etnis (Onuch & Sasse, 2016).

Penggunaan teknologi digital berperan signifikan dalam konsolidasi solidaritas sipil. Media sosial menjadi sarana penyebaran informasi, mobilisasi emosi publik, pembentukan narasi bersama, dan penggalangan dukungan dari masyarakat internasional, sekaligus memperlihatkan tingkat agensi kewargaan yang tinggi untuk mengorganisasi diri tanpa bergantung pada institusi negara (Onuch & Hale, 2018). Skala kekerasan oleh aparat keamanan tidak melemahkan gerakan, tetapi justru memperluas partisipasi publik. Insiden pemukulan mahasiswa pada 30 November 2013 memicu peningkatan drastis partisipasi warga dari berbagai usia dan latar belakang, menegaskan terbentuknya solidaritas emosional yang didasarkan pada

penolakan moral terhadap pelanggaran hak warga negara (Diuk, 2014). Dengan demikian, Euromaidan tidak hanya mencerminkan keberhasilan taktik mobilisasi, melainkan juga membangun pengalaman kolektif lintas kelompok yang memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama terhadap negara.

Rangkaian dari kemerdekaan 1991, Revolusi Oranye 2004, hingga Euromaidan 2013 sampai 2014 memperlihatkan lintasan historis yang memproduksi dan mematangkan solidaritas sipil Ukraina. Proses ini menumbuhkan identitas kewargaan yang lebih inklusif, meningkatkan kapasitas organisasi sosial, dan membangun jaringan solidaritas lintas kelas serta lintas generasi. Modal sosial yang terkumpul menjadi fondasi ketahanan sosial yang penting dalam menghadapi krisis berikutnya. Dengan kata lain, Euromaidan bukan sekadar protes massal, melainkan proses historis yang membentuk kohesi sipil dan kapasitas kolektif yang sangat menentukan dalam respons masyarakat Ukraina terhadap ancaman eksternal pada dekade berikutnya.

2. Eskalasi Konflik Tahun 2022 dan Transformasi Solidaritas Sipil

Transformasi solidaritas sipil pada fase perang berkepanjangan ditandai keterhubungan yang makin erat antara jaringan domestik dan dukungan lintas batas. Partisipasi diaspora memperluas penggalangan dana, logistik, dan advokasi melalui kanal komunitas, asosiasi profesional, dan platform digital yang sudah ada, menyokong kebutuhan berkelanjutan seperti perlengkapan medis, perbaikan infrastruktur komunitas, dan dukungan bagi pengungsi internal. Peran lintas batas ini melengkapi konsolidasi jaringan lokal yang bertransformasi dari spontan menjadi lebih formal melalui penguatan struktur relawan dan kolaborasi lintas kota (Zhuk, 2023; Sasse & Lackner, 2022). Medan informasi menjadi ruang kunci keberlanjutan solidaritas. Kanal digital yang sejak awal dipakai untuk informasi keselamatan, koordinasi bantuan, dan klarifikasi rumor bergeser menuju manajemen informasi jangka panjang: penyusunan panduan komunitas, pembaruan kebutuhan logistik, dan kampanye untuk menjaga perhatian audiens internasional. Praktik ini memperkuat kepercayaan horizontal serta menahan disrupsi propaganda, sementara komunikasi publik yang konsisten dari kepemimpinan politik menjadi jangkar simbolik dan jaringan sipil memastikan eksekusi di tingkat komunitas (Onuch & Hale, 2022; Diuk, 2022; Yablokov, 2022; Kulyk, 2022).

Seiring meningkatnya tuntutan jangka panjang, muncul tantangan kapasitas dan prioritas. Kelelahan relawan dan tekanan ekonomi menuntut model partisipasi berkelanjutan seperti penjadwalan rotasional, pembagian peran jelas, dan dukungan psikososial. Koordinasi warga–lembaga formal memerlukan tata kelola lentur namun akuntabel, antara lain melalui mekanisme rujukan dua arah agar layanan merata dari bantuan pengungsi hingga perbaikan fasilitas publik. Keberhasilan menjaga fungsi kolektif ditopang modal sosial yang stabil, norma saling membantu, dan arsitektur kepercayaan yang dirawat lewat kolaborasi harian (Worschech, 2021; Sasse & Lackner, 2022).

Pada tingkat strategi, interaksi tekanan eksternal dan politik domestik pasca-eskalasi 2022 tetap membentuk intensitas kebutuhan dan pola mobilisasi. Kapasitas adaptif jaringan sipil menjadi penentu saat garis konflik berubah atau pasokan terganggu, dengan pertukaran praktik antarwilayah, dokumentasi pelajaran lapangan, dan standarisasi prosedur komunitas sederhana untuk mengurangi ketergantungan pada spontanitas dan memperkuat pembelajaran kelembagaan (Kofman & Kendall Taylor, 2021; Kortunov, 2019).

Sebagai sintesis, terdapat tiga pergeseran utama sejak 2022: dari spontanitas menuju institusionalisasi yang menjaga keberlanjutan partisipasi; dari koordinasi ad hoc menuju manajemen informasi jangka panjang dengan verifikasi dan kampanye berkelanjutan; serta dari bantuan darurat menuju portofolio layanan komunitas yang lebih luas mencakup dukungan psikososial, pendidikan darurat, stabilisasi ekonomi rumah tangga, dan perbaikan infrastruktur dasar. Tiga pergeseran ini membentuk kapasitas sosial yang terstruktur dan adaptif,

memungkinkan keberfungsian kolektif terjaga, beban institusi formal berkurang, dan legitimasi domestik terpelihara sepanjang fase perang berkepanjangan (Zhuk, 2023; Worschech, 2021).

3. Solidaritas Sipil Sebagai Mekanisme Pembentukan Identitas dan Kohesi Nasional

Invasi Rusia pada Februari 2022 menandai titik balik dalam dinamika identitas nasional Ukraina. Sebelum eskalasi kekerasan tersebut, identitas Ukraina bersifat berlapis dan tidak sepenuhnya homogen, dipengaruhi oleh sejarah imperial Rusia dan Uni Soviet, pluralitas linguistik, serta segmentasi politik regional yang telah lama mengemuka dalam kehidupan sosial dan politik (Kuzio, 2015). Meskipun identifikasi nasional menguat sejak 1991, sebagian masyarakat, terutama di wilayah selatan dan timur, tetap memelihara keterikatan budaya atau linguistik dengan Rusia, sehingga spektrum identitas kerap memunculkan posisi ambivalen di tingkat individu maupun komunitas (Kulyk, 2016). Agresi berskala penuh mengubah konfigurasi ini secara signifikan. Serangan terhadap ruang hidup warga yang meliputi pemboman kawasan pemukiman, perpindahan paksa, dan pendudukan wilayah mendorong reorientasi identitas yang cepat dan luas. Studi pascainvasi menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang sebelumnya berada pada posisi ambivalen justru memperlihatkan peningkatan identifikasi nasional yang tegas, termasuk di kalangan penutur bahasa Rusia yang selama ini dianggap berada di wilayah abu-abu dalam spektrum identitas (Weller, 2023). Dengan demikian, pengalaman kekerasan kolektif berfungsi sebagai pemicu konsolidasi identitas Ukraina sebagai komunitas politik yang terancam dan karenanya mengonsolidasikan batas simbolik antara diri dan pihak luar.

Transformasi identitas ini diperkuat oleh peran masyarakat sipil yang memobilisasi dukungan secara cepat dan terarah. Berbagai jaringan relawan, inisiatif bantuan kemanusiaan, pendokumentasian kejahatan perang, serta koordinasi akar rumput untuk kebutuhan militer dan pengungsi membentuk pola patriotisme kewargaan yang bersifat praksis, yaitu berbasis tindakan dan partisipasi publik nyata, bukan sekadar slogan atau simbol retorik (Onuch & Arendt, 2023). Identitas nasional pascainvasi semakin ditopang oleh keterlibatan aktif warga dalam mempertahankan negara, bukan oleh faktor etnolinguistik semata. Peran diaspora menambah lapisan transnasional pada identitas tersebut. Melalui kampanye internasional, mobilisasi keuangan, dan advokasi kebijakan, diaspora Ukraina memperluas cakupan identitas nasional ke ranah lintas negara dan memperkuat legitimasi eksternal Ukraina di forum internasional, menunjukkan bahwa keanggotaan komunitas nasional dapat melampaui batas geografis negara (Sasse, 2023). Dalam waktu yang sama, berbagai komunitas minoritas seperti Tatar Krimea, kelompok Hungaria di Zakarpattia, dan komunitas etnolinguistik lain menunjukkan komitmen yang meningkat terhadap proyek nasional Ukraina. Konstelasi ini menegaskan bahwa transformasi identitas pascainvasi bersifat inklusif dan tidak diarahkan untuk menghapus keberagaman internal, melainkan memelihara kontrak sosial untuk mempertahankan kedaulatan dan keberlanjutan negara di tengah ancaman eksternal yang berkelanjutan (Jarabik & De Waal, 2022). Secara keseluruhan, invasi 2022 mempercepat pergeseran orientasi identitas nasional dari basis historis dan linguistik menuju pengalaman kolektif menghadapi ancaman eksistensial, yang kemudian ditopang oleh solidaritas lintas batas dan praktik partisipasi warga.

Ancaman eksternal pada 2022 juga mengaktifkan kembali garis patahan historis yang sejak awal kemerdekaan menjadi tantangan bagi konsolidasi identitas nasional Ukraina, seperti perbedaan bahasa, orientasi geopolitik, struktur identitas regional, dan memori imperial yang diwariskan oleh orbit kekuasaan Rusia dan Uni Soviet. Namun alih-alih memperdalam perpecahan, invasi memicu mobilisasi solidaritas sipil yang justru mengurangi dampak politik dari perbedaan tersebut. Survei nasional menunjukkan peningkatan signifikan dalam identifikasi sebagai Ukraina di seluruh wilayah, termasuk di oblast timur dan selatan yang sebelumnya memiliki afinitas budaya yang lebih besar terhadap Rusia (Kulyk, 2023; Hale, 2023). Perubahan

ini dipercepat oleh sifat ancaman yang eksistensial, yang mendorong warga melakukan reinterpretasi atas identitas dalam kerangka bertahan hidup kolektif. Meskipun berlangsung cepat, pergeseran tersebut berdiri di atas jejak fragmentasi yang masih aktif menjelang 2022. Sebelum invasi penuh, perbedaan bahasa dan preferensi geopolitik tetap membentuk orientasi politik sebagian warga, meski kecenderungannya mulai melemah sejak 2014 (Barrington & Faranda, 2022). Serangan 2022 mempercepat penurunan relevansi politik dari pembelahan ini. Warga berbahasa Rusia, komunitas religius, kelompok minoritas etnis, dan penduduk wilayah yang sebelumnya lebih pro Moskow menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam aksi relawan, dukungan logistik militer, serta berbagai inisiatif kemanusiaan, menandai perubahan cara memaknai perbedaan bukan lagi sebagai batas sosial, melainkan sebagai unsur keberagaman yang memperkuat kapasitas kolektif menghadapi perang (Fischer, 2023). Perubahan interaksi ini mendorong terbentuknya modal sosial penghubung atau *bridging social capital*, yaitu jaringan kepercayaan dan kerja sama yang menghubungkan kelompok-kelompok berbeda dalam struktur masyarakat. Praktik pengorganisasian dapur umum, jaringan evakuasi digital, unit pertahanan teritorial, dan koordinasi bantuan pengungsian mempertemukan warga dari latar sosial, linguistik, dan politik yang sebelumnya relatif terpisah, dan dari pengalaman bersama dalam situasi krisis inilah lahir bentuk kedekatan yang lebih inklusif (Onuch & Hale, 2023).

Dalam kerangka kohesi nasional, ancaman militer 2022 berfungsi sebagai katalis yang mempercepat integrasi sosial. Secara umum, ancaman eksternal berskala tinggi sering memunculkan efek rally around the flag berupa peningkatan solidaritas internal dan penguatan legitimasi negara. Akan tetapi, dalam kasus Ukraina fenomena tersebut bergerak lebih dalam, sebab ia tidak hanya meningkatkan dukungan terhadap pemerintah, melainkan juga membentuk mekanisme sosial yang memperkuat jaringan horizontal antarwarga, memperluas partisipasi publik, dan meneguhkan komitmen bersama terhadap keberlanjutan negara dalam kehidupan sehari-hari (Mueller, 2020). Peningkatan intensitas serangan sejak Februari 2022 menjadikan ancaman terhadap keselamatan warga sebagai pengalaman rutin di banyak wilayah, sehingga kanal nonmiliter seperti koordinasi relawan, donasi publik, bantuan logistik, dan digital crowd defense menjadi arena pembentukan kohesi sosial baru. Di arena ini, perbedaan politik atau identitas kultural yang sebelumnya signifikan bergeser menjadi kurang relevan dibanding urgensi mempertahankan ruang hidup bersama (Onuch & Sasse, 2023). Sejalan dengan itu, studi opini publik menunjukkan lonjakan kepercayaan terhadap institusi negara, terutama angkatan bersenjata, pemerintah lokal, dan organisasi relawan, yang merupakan indikator terkuat dari tumbuhnya functional cohesion atau kohesi fungsional, yakni solidaritas yang lahir dari kesadaran pragmatis bahwa kelangsungan negara bergantung pada kontribusi nyata setiap warga (Czaputowicz & Wojciuk, 2023). Integrasi solidaritas juga meluas dari lingkup lokal ke nasional melalui pertukaran dukungan lintas wilayah. Jaringan relawan dari kota kecil dan desa di Ukraina barat menyediakan logistik dan tempat tinggal bagi pengungsi dari wilayah garis depan, sementara komunitas di timur dan selatan menyumbangkan data lapangan, dukungan digital, dan mobilisasi sumber daya, sehingga terbentuk solidaritas dua arah yang memperkuat rasa keanggotaan dalam komunitas nasional yang lebih luas dan mempercepat konvergensi identitas di tengah ancaman eksternal (Fischer, 2023).

Dimensi emosional dari partisipasi warga menjadi pengikat tambahan bagi kohesi nasional. Tingginya keterlibatan dalam kegiatan relawan dan mobilisasi sosial membentuk *emotional community*, yakni komunitas yang berbagi emosi, narasi risiko, dan aspirasi bersama (Penttinen, 2022). Memori kolektif yang tumbuh dari pengalaman perang tidak hanya berisi penderitaan, melainkan juga menarasikan kapasitas untuk bertahan dan berkontribusi, yang pada gilirannya mempertebal rasa keanggotaan nasional dan memperluas basis sosial solidaritas sipil. Kohesi ini tidak bersifat top down, melainkan terbentuk dari interaksi horizontal warga yang

mempertahankan fungsi sosial dasar di tengah tekanan perang, sehingga solidaritas sipil hadir sebagai kekuatan sosial yang stabil, tidak hanya reaksi sesaat.

Konsolidasi solidaritas setelah 2022 juga bertumpu pada pembangunan dan reproduksi modal sosial serta simbol publik yang mengikat pengalaman kolektif. Modal sosial, baik bonding maupun bridging, berfungsi sebagai infrastruktur yang memungkinkan kohesi bertahan di tengah tekanan berkepanjangan. Perang berskala besar mendorong penguatan simultan kedua jenis modal sosial tersebut, bonding melalui solidaritas komunitas lokal dan bridging melalui kolaborasi lintas kelas, bahasa, dan wilayah, yang bersama-sama menyediakan fondasi bagi tindakan kolektif jangka panjang (Onuch & Hale, 2023). Dalam konteks ini, simbol publik memainkan peran sebagai medium yang menyatukan pengalaman bersama. Bendera Ukraina, slogan *Slava Ukraini*, penokohan pahlawan perang, serta narasi tentang warga sipil yang mempertaruhkan keselamatan untuk saling membantu berfungsi sebagai penanda emosional yang menghubungkan individu dengan komunitas nasional yang lebih luas, sekaligus sebagai alat reproduksi kohesi karena mengubah pengalaman perang menjadi memori publik yang dibagikan lintas ruang dan waktu (Zhurzenko, 2023). Saat warga menggantungkan bendera di jendela, menggalang dana daring, atau mengirim perlengkapan ke garis depan, tindakan tersebut memperkuat rasa keanggotaan kolektif dan memperluas jangkauan solidaritas ke basis yang lebih luas.

Reproduksi kohesi sosial dikuatkan oleh pola narasi yang berkembang di ruang publik. Media independen, komunitas digital, dan organisasi masyarakat sipil membingkai perang sebagai perjuangan kolektif yang melampaui perbedaan identitas lama sehingga pengalaman lokal dari kota dan desa yang terdampak dimasukkan ke dalam narasi nasional, memperbesar rasa keterhubungan lintas wilayah dan meningkatkan modal sosial (Fischer, 2023). Ruang publik yang sebelumnya bersifat rutin seperti pasar, sekolah, stasiun kereta, basis relawan, serta kanal Telegram komunitas ikut bertransformasi menjadi titik interaksi yang memperkuat kohesi karena memfasilitasi komunikasi, pertukaran sumber daya, dan pembentukan jaringan baru dalam situasi darurat berkepanjangan, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian sosiologi konflik mengenai komunitas di bawah tekanan (Penttinen, 2022). Institusionalisasi simbol dan modal sosial ini memperpanjang umur solidaritas melalui kampanye donasi massal, penghargaan bagi warga yang terlibat dalam penyelamatan, atau pameran foto yang mendokumentasikan solidaritas pada masa awal invasi. Dengan cara demikian, pengalaman solidaritas tidak hilang, tetapi diendapkan menjadi memori kolektif dan identitas nasional yang diperbarui secara berkelanjutan. Modal sosial dan simbol publik dengan demikian bukan pelengkap, melainkan mekanisme utama yang mereproduksi dan memperkuat kohesi nasional, menerjemahkan pengalaman perang menjadi struktur sosial yang lebih permanen yang menopang ketahanan sosial, mengurangi kerentanan identitas, dan memperkuat fondasi bagi tindakan kolektif pada fase fase konflik berikutnya.

4. Implementasi Nyata Solidaritas Sipil dalam Perlawanan Terhadap Agresi Rusia

Invasi besar-besaran Rusia pada Februari 2022 menghasilkan kekosongan institusional yang tidak dapat diperbaiki oleh negara tersebut dalam hitungan hari. Garis depan bergerak dengan cepat, pusat-pusat administratif kewalahan, dan sebagian rantai pasokan runtuh. Dalam ruang yang retak itu, solidaritas sipil berfungsi sebagai lapisan pertama stabilisasi, bukan melalui heroisme sporadis, melainkan melalui mobilisasi logistik yang massif, terstruktur, dan muncul dari jejaring sosial yang sudah terbangun sejak 2014. Banyak kajian, termasuk UNDP (2022), OECD (2023), dan Onuch & Hale (2023), menegaskan bahwa karakteristik paling mencolok dari masyarakat Ukraina di fase awal perang adalah kecepatan dan skala respons mereka. Sejak hari pertama, komunitas lokal mengaktifkan skema bantuan yang mencakup pengungsian spontan, distribusi makanan, layanan medis darurat, hingga pengamanan rute evakuasi. Organisasi sipil seperti Razom, *Come Back Alive*, dan jaringan sukarelawan gereja

Ortodoks maupun Katolik mengisi ruang-ruang yang tidak sempat dijangkau pemerintah pusat. Bahkan lembaga-lembaga kecil seperti kelompok ibu rumah tangga, klub olahraga, atau asosiasi alumni universitas bergerak menjadi pusat produksi kebutuhan militer dan sipil seperti rompi antipeluru rakitan, paket medis individual (IFAK), jaring kamuflase, dan ransum kering. OECD (2023) mendokumentasikan bahwa lebih dari 80% warga terlibat dalam bentuk kontribusi yang bisa dilacak secara langsung, mulai dari memasak untuk tentara, membuka rumah sebagai tempat tinggal pengungsi, menggalang dana, mengangkut logistik dengan mobil pribadi, hingga membeli drone komersial untuk unit militer lokal. Skala tanggapan ini tidak hanya mengurangi tekanan pada aparat negara, tetapi juga membentuk “urat nadi paralel” yang membantu mempertahankan kapasitas tempur angkatan bersenjata. Bantuan kemanusiaan yang dikoordinasikan warga turut menciptakan stabilitas psikologis pada populasi sipil; dalam kondisi pengeboman yang berulang, masyarakat tidak runtuh dalam kepanikan kolektif karena melihat infrastruktur sosial, yang tidak selalu formal, tetap berfungsi. IOM (2023) melaporkan bahwa keberadaan jaringan pengungsi berbasis komunitas mengurangi risiko keputusan massal, penjarahan, serta dislokasi sosial yang umum terjadi dalam perang. Ketika saluran resmi terhambat, masyarakat beralih ke teknologi seperti pemetaan digital untuk evakuasi, crowdfunding internasional, pengumpulan dana dalam cryptocurrency, serta koordinasi melalui platform seperti Telegram dan Viber. Fenomena ini menciptakan apa yang oleh beberapa peneliti disebut sebagai “*civilian logistical ecosystem*”, sebuah ekosistem logistik sipil yang bersifat desentralisasi namun efektif. Dengan demikian, mobilisasi bantuan kemanusiaan dan logistik bukan sekadar aktivitas penyangga, tetapi fondasi awal yang memungkinkan negara mempertahankan fungsi dasar, membatasi kehancuran sosial, dan menjaga moral publik. Tanpa fondasi ini, perlawanan militer Ukraina akan berada dalam posisi jauh lebih rapuh; dengan fondasi ini, negara memiliki ruang bernapas untuk mengatur kembali strategi, merealokasi pasokan, dan mengembangkan operasi militer jangka panjang.

Dari sini, invasi 2022 mempercepat terbentuknya pola relasi baru antara warga sipil dan militer, dengan batas yang lebih lentur tanpa menghilangkan struktur komando formal negara. Relawan bukan sekadar aktor tambahan, melainkan komponen integral ekosistem pertahanan nasional. Integrasi sipil–militer ini bertumpu pada pengalaman sejak 2014 ketika masyarakat sipil untuk pertama kalinya terlibat dalam pendistribusian logistik militer, pendirian batalion sukarelawan, dan dukungan moral bagi pasukan garis depan (Yekelchyk, 2015; Onuch & Sasse, 2022). Pasca-2022, bentuk integrasi ini berubah dari pendampingan menjadi kolaborasi strategis. Jaringan relawan membantu unit militer menentukan kebutuhan prioritas, mulai dari alat komunikasi taktis, kendaraan 4x4, peralatan optik, hingga drone pengintai, dan melakukan pengadaan melalui jalur yang lebih cepat serta fleksibel dibandingkan birokrasi negara. Onuch & Hale (2023) menunjukkan bahwa lebih dari separuh unit pertahanan teritorial menerima dukungan material langsung dari kelompok relawan pada tiga bulan pertama perang, sehingga ketika logistik militer berada di bawah tekanan ekstrem, relawan berfungsi sebagai saluran distribusi alternatif yang mempercepat aliran peralatan ke garis depan. Selain dukungan material, integrasi juga terjadi secara operasional melalui keahlian profesional warga seperti dokter, insinyur, analis data, fotografer udara, hingga ahli pemetaan yang menyumbangkan keterampilan mereka secara langsung. Unit-unit UAV yang berkembang pesat sepanjang 2022 banyak dibangun melalui gabungan inovator sipil dan personel militer yang bekerja berdampingan, sejalan dengan temuan Harding & Lanoszka (2023) bahwa inovasi teknologi dalam perang Ukraina sering muncul dari inisiatif masyarakat, bukan hanya struktur formal negara. Di tingkat lokal, hubungan ini memperlihatkan kepercayaan timbal balik: warga menyediakan dukungan logistik, rumah singgah, transportasi, dan infrastruktur komunikasi, sementara pasukan militer menjaga keamanan komunitas dan menyediakan informasi situasional yang dibutuhkan warga. Dalam banyak kasus, integrasi tersebut menciptakan rantai pertahanan berlapis yang memungkinkan kota-kota bertahan selama pengepungan seperti di

Chernihiv, Mykolaiv, dan Kharkiv pada fase awal perang (UNDP, 2022). Keterlibatan langsung warga dalam upaya pertahanan juga menumbuhkan *sense of ownership* terhadap perlawanan nasional; ketika warga mengirimkan drone, rompi antipeluru, atau ambulans taktis hasil donasi kolektif, mereka memperkuat gagasan bahwa pertahanan nasional adalah tugas bersama, yang pada gilirannya memperkuat moral pasukan dan meningkatkan rasa keterhubungan antara garis depan dan masyarakat di belakangnya (Fischer, 2023).

Di ranah eksternal, diaspora Ukraina memainkan peran signifikan dalam memperluas kapasitas perlawanan negara sejak invasi penuh pada 2022. Sebelum perang, komunitas diaspora telah memiliki organisasi sosial dan budaya yang solid di Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, dan Australia, namun jaringan tersebut memperoleh makna strategis baru ketika konflik eskalatif mengancam keberlanjutan negara (Popson, 2022; Shevel, 2023). Secara material, diaspora menyediakan aliran logistik yang sulit dipenuhi negara pada fase awal invasi melalui organisasi seperti *United Help Ukraine*, *Razom for Ukraine*, dan jaringan lokal di Inggris, Polandia, atau Jerman yang mengirim perlengkapan medis, kendaraan taktis, generator listrik, dan drone komersial yang kemudian dimodifikasi di Ukraina. Razom (2022) melaporkan peningkatan donasi lebih dari sepuluh kali lipat dalam bulan pertama invasi, memungkinkan pengiriman ribuan kit pertolongan pertama dan peralatan komunikasi ke unit-unit pertahanan teritorial. Dukungan diaspora sering bekerja lebih cepat daripada mekanisme resmi bantuan negara berkat basis *crowdfunding* dan logistik komunitas yang fleksibel. Selain itu, diaspora berkontribusi melalui advokasi politik: lobi intensif untuk mendorong sanksi ekonomi terhadap Rusia, mempercepat pengiriman bantuan militer, serta memperkuat koordinasi negara-negara NATO. Pop-Eleches & Robertson (2023) menunjukkan bahwa kampanye diaspora berperan penting dalam menggeser opini publik Barat menuju dukungan yang lebih besar, terutama melalui demonstrasi, petisi, dan intervensi media. Dalam domain informasi, diaspora menjadi agen penjelas yang menyampaikan konteks sejarah, status hukum internasional, dan kondisi kemanusiaan, menggunakan kemampuan bahasa multi-negara dan jejaring media lokal untuk mereduksi misinformasi serta memperluas jangkauan komunikasi resmi, sejalan dengan temuan Onuch & Hale (2023). Di tingkat sosial, mobilisasi diaspora menciptakan keterhubungan emosional melalui donasi berskala kecil untuk unit atau komunitas tertentu, yang memperlihatkan bahwa perlawanan nasional bekerja sebagai jaringan transnasional yang digerakkan memori bersama, rasa kehilangan, dan tanggung jawab moral terhadap negara asal (Shevel, 2023). Dengan demikian, diaspora memperkuat tiga komponen utama perlawanan: kapasitas logistik, dukungan politik internasional, dan legitimasi naratif.

Solidaritas transnasional yang muncul setelah 2022 memperluas dimensi perlawanan Ukraina melampaui lingkup negara-bangsa, mencakup organisasi masyarakat sipil internasional, komunitas aktivis lintas negara, pemerintah daerah di Eropa, universitas, serikat pekerja, hingga kelompok sukarelawan digital (Snyder, 2023; DeBardleben & Osipov, 2023). Pada level praksis, diplomasi akar rumput terwujud melalui pertukaran kota-kembar yang dihidupkan kembali, ketika puluhan kota di Eropa seperti Warsaw, Vilnius, Tallinn, Rotterdam, dan Glasgow menjalin kemitraan langsung dengan kota-kota di Ukraina untuk menyediakan dukungan logistik, suplai medis, genset listrik, hingga bantuan rekonstruksi awal (Eurocities, 2022). Di ranah digital, kelompok relawan siber di Eropa, Amerika Utara, dan Asia membentuk koalisi informal untuk membantu Ukraina menghadapi disinformasi, serangan siber, dan manipulasi informasi, dengan contoh IT Army of Ukraine yang keanggotaannya lintas negara (Martinsen, 2023). Gerakan advokasi global yang dipelopori NGO internasional dan jaringan aktivis hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Human Rights Watch memfasilitasi dokumentasi kejahatan perang, pemantauan korban sipil, dan kampanye akuntabilitas pada tingkat internasional (Cohen & Sikkink, 2023). Bersamaan dengan itu, koalisi kemanusiaan lintas negara seperti *Médecins Sans Frontières*, *Norwegian Refugee Council*, atau *Save the Children* mengoperasikan bantuan medis, evakuasi sipil, pangan, dan perlindungan anak,

sehingga mengurangi tekanan pada kapasitas domestik Ukraina dan menegaskan bahwa perjuangan mempertahankan negara merupakan isu global, bukan semata konflik regional. Berbagai studi mencatat bahwa solidaritas transnasional juga berfungsi simbolik karena memperkuat rasa bahwa Ukraina tidak berjuang sendirian, dengan efek psikologis dan sosial yang signifikan dalam perang berkepanjangan karena meningkatkan moral publik dan ketahanan sosial internal (Fischer, 2023). Keseluruhan dinamika ini memperlihatkan bahwa dukungan lintas batas memperkuat kapasitas negara di bidang logistik, informasi, diplomasi, dan kemanusiaan, sekaligus menegaskan bahwa perlawanan Ukraina merupakan hasil aktivasi solidaritas yang menjangkau jaringan global untuk mempertahankan norma dasar tatanan dunia seperti kedaulatan, martabat manusia, dan perlindungan warga sipil.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa solidaritas sipil memainkan peran fundamental dalam membentuk kapasitas perlawanan masyarakat Ukraina terhadap agresi Rusia. Solidaritas tersebut bekerja melalui proses historis yang panjang: dari konsolidasi identitas nasional pasca-kemerdekaan, dinamika mobilisasi pada Revolusi Oranye dan Euromaidan, hingga transformasinya setelah invasi 2022 menjadi jaringan sosial yang lebih matang dan terstruktur. Invasi berskala besar menempatkan masyarakat Ukraina pada situasi ancaman eksistensial yang mendorong aktivasi modal sosial secara luas: mulai dari mobilisasi relawan, produksi logistik pertahanan, donasi publik, diaspora activism, hingga diplomasi akar rumput lintas-batas. Seluruh dinamika ini memperlihatkan bahwa perlawanan Ukraina tidak hanya bergantung pada kapasitas militer negara, tetapi juga pada daya hidup sosial yang muncul dari warga biasa. Dengan demikian, solidaritas sipil terbukti berfungsi sebagai mekanisme pembentukan identitas, kohesi nasional, serta penggerak utama partisipasi masyarakat dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kesimpulan utama penelitian ini adalah bahwa perlawanan Ukraina merupakan hasil dari interaksi antara ancaman eksternal dan penguatan internal di tingkat masyarakat. Solidaritas sipil bukan sekadar respons spontan, melainkan kekuatan sosial yang terakumulasi dan berperan sebagai fondasi ketahanan nasional dalam konteks perang modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, E. (1997). Seizing the middle ground: Constructivism in world politics. *European Journal of International Relations*, 3(3), 319–363.
- Anderson, B. (2006). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. Verso.
- Beissinger, M. R. (2013). The semblance of democratic revolution: Coalitions in Ukraine's Orange Revolution. *American Political Science Review*, 107(3), 574–592.
- Berenskoetter, F. (2007). Friends, there are no friends? An intimate reframing of the international. *Millennium: Journal of International Studies*, 35(3), 647–676.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative research journal*, 9(2), 27–40.
- Chekunova, M., & Kulakevich, T. (2023). Civil resistance, resilience, and solidarity: Ukrainian society in the face of Russian aggression. *Demokratizatsiya*, 31(2), 185–205.
- Diukov, I., & Onuch, O. (2022). Ukraine's Maidan: Between revolution and resilience. *Journal of Democracy*, 33(2), 45–59.
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International norm dynamics and political change. *International Organization*, 52(4), 887–917.
- Freedman, L. (2023). Command and control in Ukraine: Lessons on modern war. *Survival*, 65(4), 7–30.

- Galeotti, M. (2022). *The weaponisation of everything: A field guide to the new way of war*. Yale University Press.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Glasius, M. (2022). *Transnational civil society: Moral authority in global politics*. Routledge.
- Gruszczak, A. (2022). *Hybrid warfare and information: Influence and legitimacy in the cyber era*. Routledge.
- Hale, H. E. (2014). *Patronal politics: Eurasian regime dynamics in comparative perspective*. Cambridge University Press.
- Hoffman, F. G. (2007). *Conflict in the 21st century: The rise of hybrid wars*. Potomac Institute for Policy Studies.
- Hopf, T. (2002). *Social construction of international politics: Identities and foreign policies*. Cornell University Press.
- Kaldor, M. (2012). *New and old wars: Organized violence in a global era* (3rd ed.). Polity Press.
- Katzenstein, P. J. (Ed.). (1996). *The culture of national security: Norms and identity in world politics*. Columbia University Press.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists beyond borders: Advocacy networks in international politics*. Cornell University Press.
- Kofman, M., & Lee, R. (2022). Not built for purpose: The Russian military's failures in Ukraine. *Foreign Affairs*, 101(4), 56–67.
- Mack, A. (1975). Why big nations lose small wars: The politics of asymmetric conflict. *World Politics*, 27(2), 175–200.
- Mälksoo, M. (2023). War and resilience: Ukraine's lessons for European security. *Survival*, 65(3), 7–26.
- Mankoff, J. (2022). *Empires of Eurasia: How imperial legacies shape international security*. Yale University Press.
- Marples, D. R. (2022). *Understanding Ukraine and Belarus: A history of the lands and peoples*. Rowman & Littlefield.
- Menon, R., & Rumer, E. (2015). *Conflict in Ukraine: The unwinding of the post-Cold War order*. MIT Press.
- Mitzen, J. (2006). Ontological security in world politics: State identity and the security dilemma. *European Journal of International Relations*, 12(3), 341–370.
- McFaul, M. (2022). The Putin information war and the challenge for democracies. *Journal of Democracy*, 33(3), 5–17.
- Onuch, O. (2014). *Mapping mass mobilization: Understanding revolutionary moments in Argentina and Ukraine*. Palgrave Macmillan.
- Plokhly, S. (2015). *The gates of Europe: A history of Ukraine*. Basic Books.
- Pomerantsev, P. (2019). *This is not propaganda: Adventures in the war against reality*. Faber & Faber.
- Rauta, V. (2021). Twenty years of (studying) hybrid warfare. *Journal of Strategic Studies*, 44(6), 1001–1042.
- Rid, T. (2020). *Active measures: The secret history of disinformation and political warfare*. Farrar, Straus and Giroux.
- Risse, T. (2000). "Let's argue!": Communicative action in world politics. *International Organization*, 54(1), 1–39.
- Risse, T. (2020). *Transnational actors and world politics*. SAGE.
- Sloan, E. (2012). *Modern military strategy: An introduction*. Routledge.
- Starbird, K. (2017). Examining the alternative media ecosystem through the production of disinformation. *Proceedings of ICWSM*, 230–239.
- Subotić, J. (2016). Narrative, ontological security, and foreign policy change. *Foreign Policy Analysis*, 12(4), 610–627.

- Tarrow, S. (2005). *The new transnational activism*. Cambridge University Press.
- Way, L. (2014). The Maidan and beyond: Civil society and democratization. *Journal of Democracy*, 25(3), 35–43.
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics. *International Organization*, 46(2), 391–425.
- Wendt, A. (1999). *Social theory of international politics*. Cambridge University Press.